

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan Renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya. Oleh karena itu suatu Kewajiban Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah dalam mewujudkan Visi, Misi, Program dan kemudian ditindak lanjuti pada Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan Satuan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perangkat otonomi daerah yang mempunyai visi dan misi sesuai kompetensi yang dimiliki serta koheren dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja (Renja) yang dilaksanakan pada setiap tahunnya dalam rangka mengukur kinerja Organisasi dan sebagai tindak lanjut penjabaran dari Rencana Strategis Jangka Menengah (Lima Tahunan) yang capaian kinerjanya diukur setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja SKPD ditindak lanjuti dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya dan selanjutnya diproses dalam penyusunan RAPBD.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2018 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi

proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2018 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I P E N D A H U L U A N

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan capaian tahun berjalan (2018) sampai triwulan II sebagai bahan acuan untuk perubahan Rencana Kerja Tahun 2018. Dari hasil tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah mencapai target dan program kegiatan yang belum mencapai target.

Secara umum program kegiatan yang dilaksanakan beberapa telah mencapai target yang ditentukan, namun sebagian belum mencapai target. Hal ini disebabkan terjadinya pertanggungjawaban keuangan SKPD yang terlambat, dengan demikian akan mempengaruhi pelaksanaan renja sebagaimana telah ditetapkan pada awal perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan. Sebab lain adalah keuangan daerah yang terbatas sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat dianggarkan, demikian pula program yang telah mendapat anggaran tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya dana.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian prosentase pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2017 dengan target sebesar 99,90 %. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI s.d. TAHUN 2017 S.D. TRIWULAN II 2018

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2018) (Target APBD)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRAS/ SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Triwulan II tahun 2018	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>11</i>
1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran	100%							
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	950	570	190	190	100,0%	190	950	

1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	5	3	1	1	100,0%	0	4	
02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin	5	3	1	0	0,0%	1	4	
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	75	45	11	11	100,0%	11	67	
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	75	45	15	15	100,0%	15	75	
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	125	75	22	15	68,2%	22	112	
02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	25	5	0	0	0,0%	0	5	
1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang diikutkan diklat	100%	-	-	-	-	-	-	
5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan								

5.2.06.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	20	12	4	4	100,0%	4	20
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>
1.15.01.	<i>Bidang Koperasi</i>								
1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif							
18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	40	40	-	0	-	0	40
18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dikunjungi dalam money	152	75	37	0	0%	0	75
18.10	Pembinaan, Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina kelembagaan dan usahanya	196	120	11	0	-	46	166
18.11	Penilaian Kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kegiatan usaha simpan pinjamnya	45	30	20	20	100,0%	0%	50
18.16	Study banding	Jumlah pelaksanaan study banding	1	0	-	-	-	-	-
1.15.01.19	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi	Prosentase pengelola koperasi yang mengikuti penyuluhan/pelatihan							

15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi								
15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase angkatan kerja yang mengikuti diklat keterampilan	100%	60,00%	20	0%	0%	0	60,00%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10=(5+7+9)</i>	<i>1</i>
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan penempatan								
16.01	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Persentase peningkatan UMKM melalui kelembagaan koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.03	Kerjasama Pendidikan dan pelatihan	Persentase Kerjasama Pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	100%	60,00%	80,00%	80,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jml lembaga ketenagakerjaan yg tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum								
17.05	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum	100%	60,00%	80,00%		0%	100,00%	100,00%	

	BIDANG TRANSMIGRASI								
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina							
15.03	Penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase sarana prasarana sosial ekonomi yang diserahkan di kawasan transmigrasi	100%	60%	80%	80%	100%	100%	100%
15.06	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan kerjasama antar wil antar pelaku dan antar sektor dlm rangka pengembangan transmigrasi	100%	60%	80%	0	0%	100%	100%

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan berupa sentralisasi penyediaan bahan bacaan (koran) pada satu OPD tertentu sehingga penganggaran kegiatan ini tidak ada di setiap OPD.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang dialokasikan serta meubiler yang ada sebagian besar masih dalam kondisi baik sehingga tidak mendesak untuk dibiayai untuk pemeliharaannya.
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan berupa sentralisasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di BKD.
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan study banding. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - e. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi
 - Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.

- Kegiatan Penyuluhan Perkoperasian. Kegiatan ini telah mencapai target 63%, namun karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi bagi Pengelola Koperasi. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak
 - Kegiatan Temu Usaha Kemitraan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak
- f. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- Kegiatan Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Perencanaan Koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Penciptaan Iklim Usaha kecil menengah yang kondusif lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
- g. Program Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.

- Kegiatan Koordinasi pemamfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Pengembangan Sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, sehingga dipriorotaskan untuk kegiatan yang lebih mendesak.
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Penyediaan administrasi keuangan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Kegiatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi.
 - Kegiatan Pembinaan, Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- e. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- f. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UKM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah
- g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Kegiatan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 - Kegiatan Kerjasama Pendidikan dan pelatihan
- h. Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
 - Kegiatan Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- i. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- Kegiatan Penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
 - Kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - Kegiatan Penilaian Kesehatan koperasi. Kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan disebabkan oleh penekanan program pusat yang memprioritaskan kegiatan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam (USP) koperasi, sehingga di setiap daerah diharuskan untuk melaksanakan penilaian kesehatan USP secara rutin dan menyeluruh.
 - Implikasi yang timbul terhadap terget capaian program renstra PD

Target capaian program yang telah ditetapkan dalam renstra merupakan ukuran kesuksesan pembangunan yang direncanakan. Capaian target yang kurang mengakibatkan sektor tersebut kurang berkembang sesuai harapan dan perlu upaya selanjutnya untuk pencapaiannya atau diperlukan program yang lain untuk mengatasi capaian yang rendah.

Sedangkan target yang tercapai atau bahkan melampaui memberikan implikasi yang positif bagi keberhasilan program bersangkutan. Namun bukan berarti program tersebut patut dihentikan, masih perlu dilihat tantangan ke depan apakah program yang mencapai target masih diperlukan atau diganti dengan program yang lain.
 - Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kegagalan pencapaian target umumnya diakibatkan ketersediaan anggaran yang kurang. Oleh sebab itu perencanaan selanjutnya perlu dilakukan dengan arif. Pemilihan program dan penetapan target perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan tanpa adanya penambahan atau pengurangan target kinerja. Hal ini menyikapi kondisi yang terjadi pada OPD kami.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

RUMUSAN RENCANA
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRA
KABUPATEN
PROVINSI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		
			Lokasi		Target Capaian
			Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2.11.01.01	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	SEKRETARIAT :				
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran			
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	190
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	12
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	1
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	11
01.07	Penyediaan administrasi keuangan	Waktu Penyediaan administrasi keuangan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	12
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	12

01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	40
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bacaan yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	0
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	50
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	Dalam Kab. Sidrap	100
01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	12
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	0
02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	1
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	11
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	15
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	22
02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	0

05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang diikuti diklat			-
06.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan			-
06.05	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Pangkajene Sidenreng	Pangkajene Sidenreng	4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	BIDANG KOPERASI :				
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentasi koperasi aktif			
18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah pelaksanaan koor-dinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	Prov. Dan Pusat	Prov. Dan Pusat	10 Kali
18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dikunjungi dalam monev	11 Kecamatan	11 Kecamatan	40 Koperasi
18.10	Pembinaan, Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina kelembagaan dan usahanya	11 Kecamatan	11 Kecamatan	46 Koperasi
18.11	Penilaian Kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kegiatan usaha simpan pinjamnya	11 Kecamatan	11 Kecamatan	25 koperasi
18.16	Study banding	Jumlah pelaksanaan study banding	KSP Berkat Kab Bulukumba	KSP Berkat Kab Bulukumba	1 kali

19	Program Peningkatan SDM. Koperasi	Prosentase pengelola koperasi yg mengikuti penyuluhan/pelatihan			
19.01	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Sidrap	Sidrap	3 Kali/ 30 Orang
19.02	Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkoperasian	Sidrap	Sidrap	6 Kali/ 30 Orang
03	Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi bagi Pengelola Koperasi	Jumlah pelaksanaan pelatihan organisasi dan manajemen Koperasi bagi pengelola koperasi	Sidrap	Sidrap	3 Kali/ 30 Orang
04	Temu Usaha Kemitraan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Temu usaha kemitraan	Sidrap	Sidrap	1 Kali/ 30 Orang
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	BIDANG UMKM :				
15.	Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM yg mendapatkan layanan fasilitas/ pembinaan			
15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah	Persentase Terwujudnya tata kelola kelembagaan	Sidrap	Sidrap	-
15.06	Perencanaan Koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah	Persentase Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM	Sidrap	Sidrap	-
15.12	Penciptaan Iklim Usaha kecil menengah yang kondusif lainnya	Persentase Terciptanya UMKM Percontohan	Sidrap	Sidrap	-

16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yg mendapatkan pelatihan dan pembinaan			
16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase wirausaha baru berbasis Desa/Kel.	Sidrap	Sidrap	42,85%
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM	Pelaksanaan promosi pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM			
17.02	Pengembangan Klaster Bisnis	Persentase Terciptanya daya saing UMKM	Sidrap	Sidrap	-
17.03	Koordinasi pemamfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah	Persentase Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi UMKM	Sidrap	Sidrap	40%, 1 unit
17.06	Pengembangan Sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Persentase Galeri UMKM yang terbangun	Sidrap	Sidrap	25%, 1 unit
17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Persentase UMKM yang menjalin kemitraan	Sidrap	Sidrap	35%
17.09	Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah	Persentase Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	Dalam dan Luar Provinsi	Dalam dan Luar Provinsi	15%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
17.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase UMKM yang terdata	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100,00%
	BIDANG TENAGA KERJA				

15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK			
15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase angkatan kerja yang mengikuti diklat keterampilan	Desa/Kel	Desa/Kel	20 org
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan penempatan 857 TK			
16.01	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Persentase peningkatan UMKM melalui kelembagaan koperasi	Desa/Kel	Desa/Kel	350 org (35 klp)
16.03	Kerjasama Pendidikan dan pelatihan	Persentase Kerjasama Pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Desa/Kel	Desa/Kel	100,00%
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yg tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum			
17.05	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum	Kab Sidrap	Kab Sidrap	100
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	BIDANG TRANSMIGRASI				

15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina 100 KK			
15.03	Penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase sarana prasarana sosial ekonomi yang diserahkan di kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	50
15.06	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Peningkatan kerjasama antar wil antar pelaku dan antar sektor dlm rangka pengembangan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	20

Tabel III.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 DAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2.11.01.01	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				3.425.000.00
	SEKRETARIAT :				840.000.00
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran			720.500.000
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	Pangkajene Sidenreng	190	1.000.00

01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pangkajene Sidenreng	12	45.000.000
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Pangkajene Sidenreng	0	-
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa perizinan	Pangkajene Sidenreng	10	6.000.000
01.07	Penyediaan administrasi keuangan	Waktu Penyediaan administrasi keuangan	Pangkajene Sidenreng	12	140.000.000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pangkajene Sidenreng	12	27.000.000
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah & jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	40	1.500.000
01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dan jenis bacaan yang disediakan	Pangkajene Sidenreng	0	
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten dan Luar Provinsi	70	220.000.000
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam Kab. Sidrap	100	10.000.000
01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkajene Sidenreng	12	270.000.000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			106.000.000
02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	Pangkajene Sidenreng	0	-

02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin	Pangkajene Sidenreng	1	30.000.000
02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin	Pangkajene Sidenreng	11	50.000.000
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	15	13.500.000
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	22	12.500.000
02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	Pangkajene Sidenreng	0	
05.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang diikuti diklat		-	
06.	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja keuangan			13.500.000
06.05	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan	Pangkajene Sidenreng	4	13.500.000
	BIDANG KOPERASI :				150.000.000
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentasi koperasi aktif			90.000.000

18.01	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	Jumlah pelaksanaan koor-dinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	Prov. Dan Pusat	-	0
18.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang dikunjungi dalam monev	11 Kecamatan	-	0
18.10	Pembinaan, Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina kelembagaan dan usahanya	11 Kecamatan	46	90.000.00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
18.11	Penilaian Kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kegiatan usaha simpan pinjamnya	11 Kecamatan	-	
18.16	Study banding	Jumlah pelaksanaan study banding	KSP Berkat Kab Bulukumba	-	
19	Program Peningkatan SDM. Koperasi	Prosentase pengelola koperasi yg mengikuti penyuluhan/pelatihan		-	60.000.00
19.01	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi	Sidrap	-	
19.02	Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkoperasian	Sidrap	3	60.000.00
03	Pelatihan Organisasi dan Manajemen Koperasi bagi Pengelola Koperasi	Jumlah pelaksanaan pelatihan organisasi dan manajemen Koperasi bagi pengelola koperasi	Sidrap	-	
04	Temu Usaha Kemitraan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Temu usaha kemitraan	Sidrap	-	
	BIDANG UMKM :				450.000.00
15.	Program Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM yg mendapatkan layanan fasilitas/ pembinaan			

15.03	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil dan menengah	Persentase Terwujudnya tata kelola kelembagaan	Sidrap	-	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
15.06	Perencanaan Koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah	Persentase Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM	Sidrap	-	
15.12	Penciptaan Iklim Usaha kecil menengah yang kondusif lainnya	Persentase Terciptanya UMKM Percontohan	Sidrap	-	
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yg mendapatkan pelatihan dan pembinaan			250.000.00
16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Persentase wirusaha baru berbasis Desa/Kel.	Sidrap	70,00%	250.000.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM	Pelaksanaan promosi pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM			200.000.00
17.02	Pengembangan Klaster Bisnis	Persentase Terciptanya daya saing UMKM	Sidrap		
17.03	Koordinasi pemamfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah	Persentase Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi UMKM	Sidrap	-	
17.06	Pengembangan Sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Persentase Galeri UMKM yang terbangun	Sidrap	-	
17.07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Persentase UMKM yang menjalin kemitraan	Sidrap	-	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

17.09	Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah	Persentase Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	Dalam dan Luar Provinsi	15%	200.000.00
17.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase UMKM yang terdata	11 Kecamatan	-	
	BIDANG TENAGA KERJA				1.735.000.00
15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan kapasitas kompetensi 1500 AK			60.000.00
15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase angkatan kerja yang mengikuti diklat keterampilan	Desa/Kel		
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase tenaga kerja yg mendapatkan penempatan 857 TK			1.625.000.00
16.01	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Persentase peningkatan UMKM melalui kelembagaan koperasi	Desa/Kel	350 org (35 klp)	525.000.00
16.03	Kerjasama Pendidikan dan pelatihan	Persentase Kerjasama Pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Desa/Kel	100,00%	1.100.000.00
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

17	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jumlah lembaga ketenagakerjaan yg tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum			50.000.00
17.05	Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan hukum		100	50.000.00
	BIDANG TRANSMIGRASI				250.000.00
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah warga transmigrasi yang dibina 100 KK			250.000.00
15.03	Penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	Persentase sarana prasarana sosial ekonomi yang diserahkan di kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	50	125.000.00
15.06	Pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase Peningkatan kerjasama antar wil antar pelaku dan antar sektor dlm rangka pengembangan transmigrasi	Kawasan transmigrasi	20	260.000.00

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta memperhatikan kondisi terakhir yang dihadapi OPD.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan tahun 2018.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 12 Juli 2018

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Drs. H. AMIRA A. WALLI, M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19591112 198403 1 008

